

Pengukuran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Dengan Framework Cobit 2019 Domain MEA

Zakaria Simanjuntak
Universitas Kristen Satya Wacana
e-mail: zakariasimanjuntak366@gmail.com

Abstract — Information system measurement is essential to determine how effective the system is in supporting the performance processes of an organization. This study aims to assess the effectiveness level of the Regional Government Information System (SIPD) used by a government institution in Salatiga city. The measurement was conducted using the COBIT 2019 framework as a reference. The methods used include mapping organizational goals to Enterprise Goals, then mapping Enterprise Goals to IT-Related Goals, followed by capability measurement, gap analysis, findings, and recommendations. The results of the study indicate a gap in several domains of Monitor, Evaluate, and Assess (MEA), namely Monitor, Evaluate, and Assess 01 (MEA 01) is at level 3, and Monitor, Evaluate, and Assess 02 (MEA 02) is also at level 3. Based on the analysis, improvements in managing IT decision-making performance and managing internal control systems are urgently needed so that the Regional Government Information System (SIPD) can function properly and meet user needs.

Keywords – Information system, Cobit 2019, Domain MEA, IT Governance .

Abstrak – Pengukuran sistem informasi sangat diperlukan dalam mengetahui seberapa efektif sistem informasi yang digunakan dalam membantu proses kinerja sebuah organisasi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang digunakan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman kota salatiga. Pengukuran dilakukan dengan framework cobit 2019 sebagai acuan dalam pengukuran, Metode yang digunakan meliputi pemetaan tujuan organisasi dengan Enterprise Goals, lalu pemetaan Enterprise Goals dengan IT-Related, hasil pengukuran kapabilitas, analisis Gap, temuan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan Gap dari beberapa domain *Monitor, Evaluate, and Assess* (MEA) yaitu pada *Monitor, Evaluate, and Assess 01* (MEA 01) berada pada level 3 dan *Monitor, Evaluate, and Assess 02* (MEA 02) berada pada level 3. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbaikan dalam mengelola kinerja keputusan teknologi informasi dan mengelola sistem kontrol internal sangat diperlukan agar sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat berjalan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Kata Kunci – Sistem Informasi, Cobit 2019, Domain MEA, Tata Kelola TI.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia sedang dalam tahap pembangunan menuju pemerintahan yang mengedepankan prinsip Good Governance. Pemerintahan yang efektif ini dicirikan oleh transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang menjadi dasar dalam penerapan sistem tersebut[1]. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatan teknologi terus mengalami peningkatan. Saat ini teknologi telah diterapkan di hampir semua sektor, termasuk industri, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Pada era modern keberadaan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari[2]. Dalam instansi pemerintah daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah platform terpadu yang mengelola informasi terkait pembangunan daerah, keuangan daerah, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah elemen krusial dalam mengelola administrasi dan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai proses dan tugas, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, hingga akuntansi serta pelaporan keuangan [3]. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat penting untuk mendukung proses pekerjaan dari sebuah instansi untuk mencapai kinerja yang baik dan lebih cepat berfungsi untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengolah data perencanaan

daerah menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, sistem ini juga digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah [4].

Salah satu instansi pemerintahan yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga telah mengadopsi sebuah sistem informasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini merupakan platform elektronik yang berfungsi sebagai gerbang data dan informasi terkait perencanaan pembangunan. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengendalikan pembangunan daerah.[5]. Untuk memastikan informasi yang akurat, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi berbasis website yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Aplikasi ini berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tercipta sinergi dalam penyediaan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan[6]. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini terutama berdampak pada bidang keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, di mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Salatiga sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan kini telah beralih ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Meskipun terjadi perubahan platform, proses kerja staf tidak banyak mengalami perubahan dari segi alur kerja utama. Terdapat tiga pekerjaan utama yang menjadi fokus utama dalam mendukung tugas bidang keuangan, yaitu pengeluaran atau belanja, penerimaan, dan pembuatan laporan. Setiap jenis pekerjaan ini memiliki pengguna dengan peran yang spesifik dan terfokus, dan masing-masing staf diberikan akun yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan serta tingkat akses yang diperlukan.

Namun, hasil observasi dan wawancara dengan pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga menunjukkan bahwa meskipun sistem ini sangat membantu dalam hal integrasi data dan akses informasi, masih terdapat beberapa kendala teknis yang cukup mengganggu. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah gangguan pada server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini digunakan oleh seluruh instansi pemerintahan di Indonesia, sehingga beban pada server cukup besar, dan tidak jarang terjadi downtime atau error saat staf mencoba mengakses sistem tersebut. Kendala ini sangat berpengaruh pada kelancaran proses kerja, terutama ketika server mengalami gangguan di tengah proses penginputan data ke dalam sistem.

Akibat dari gangguan teknis ini, staf bidang keuangan sering mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan akses ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kesulitan akses yang disebabkan oleh seringnya terjadi gangguan server, menyebabkan proses penginputan data dan pencatatan laporan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja secara keseluruhan. Staf sering kali harus menunggu hingga server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kembali berfungsi normal untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Kendala teknis seperti ini menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan data keuangan yang akurat dan tepat waktu bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Salatiga mempengaruhi efisiensi kinerja staf maka diperlukan pengukuran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Kota Salatiga untuk menilai efektifitas, efisiensi dan kualitas dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis tingkat kematangan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja TI di instansi, sehingga pemanfaatan TI dapat mendukung keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya[7].

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengukuran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. COBIT 2019 merupakan framework yang dirancang untuk mendukung organisasi dalam Teknologi informasi (TI) dikelola dan dikendalikan melalui pengembangan *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA), *Control Objectives for Information and Related Technologies* (COBIT) berfungsi sebagai panduan komprehensif yang membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka melalui penerapan tata kelola dan kontrol TI yang efektif.[8]. COBIT 2019 menyediakan metode terstruktur untuk menilai dan mengelola kapabilitas tata kelola TI, dengan cakupan berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, keamanan, serta kepatuhan[9]. COBIT 2019 adalah sebuah kerangka kerja yang diakui secara global untuk mengelola, mengontrol, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Kerangka ini menyediakan panduan yang menyeluruh dan terstruktur dalam perancangan serta penerapan tata kelola Teknologi dan Informasi yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Teknologi dan Informasi selaras dengan pencapaian target organisasi serta memberikan manfaat yang optimal[8]. dan domain yang dipilih pada COBIT 2019 dalam pengukuran sistem informasi ini adalah domain MEA.

Domain MEA (Monitor, Evaluate, and Assess) merupakan proses yang berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kebutuhan perusahaan dalam mengelola proses TI serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola yang berlaku. Domain ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu MEA01, MEA02, MEA03, yang mencakup pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian sistem, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebutuhan eksternal.[10]. Domain MEA dipilih karena berfokus pada evaluasi kinerja dan kepatuhan TI. MEA berperan dalam menilai efektivitas serta efisiensi sistem SIPD, sekaligus memastikan bahwa sistem ini mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, MEA memberikan gambaran yang jelas mengenai performa serta tingkat kepatuhan sistem terhadap standar yang ditetapkan.[11].

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Dalam penelitian terdahulu terkait pengukuran sistem informasi sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Nawaningtyas Pusparini, Asrusl Sani yang berjudul Mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi akademik dengan model kesuksesan DELON AND MCLEAN Pengujian sistem dengan model DeLone and McLean mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berperan dalam pengembangan sistem, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Selain itu, sistem informasi akademik yang saat ini digunakan secara keseluruhan menunjukkan kualitas yang baik dengan perolehan nilai sebesar 81,63%.[12].

hasil penelitian dari Rima Jayanti, Iyeh Supriatna yang berjudul Audit Tata Kelola Sistem Informasi Daerah (SIPD) Menggunakan Framework COBIT 5 (Studi Kasus Pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat) Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat kematangan (Maturity Level) SIPD diperoleh sebesar 2,88, yang berada pada level 2 dengan kategori "Repeatable but Intuitive". Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah bertransisi dari tahap kebiasaan dan pengulangan menuju proses yang lebih terstruktur.[13].

Hasil penelitian dari Angga Pratama, Ananda Faridhatul Ulva, Eza Pradanta Sitepu yang berjudul Audit Capability Level Sipd Menggunakan Cobit 2019 Domain Align Plan And Organize Di Bappeda Kota Alhokseumawe Hasil audit menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang ada pada SIPD BAPPEDA Kota Lhokseumawe Masih berada di level 2 (Managed Process). Namun, dalam domain proses, APO01 dan APO02 telah mencapai level 3, sedangkan APO06, APO07, dan APO14 tetap berada pada level 2. Hal ini mengindikasikan bahwa kelima domain proses APO dalam COBIT telah memasuki tahap implementasi, yang selanjutnya akan ditetapkan sesuai dengan penerapan yang telah dijalankan dalam masing-masing domain proses tersebut.[14].

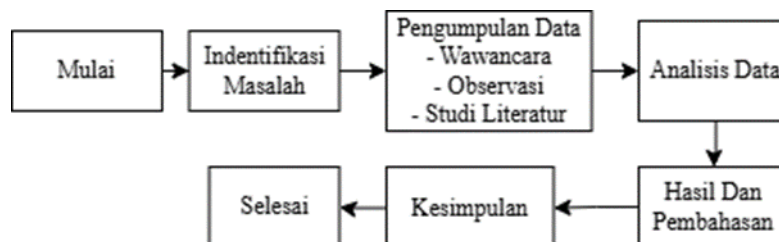
Penelitian yang dilakukan oleh Dayanara Gading Puspita, Hawwin Mardhiana, dan Muhamad Nasrullah yang berjudul Analisis dan pengukuran tingkat kematangan sistem absensi online menggunakan framework COBIT 5.0 (studi kasus: badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten tuban) Hasil analisis dan evaluasi terhadap proses MEA01, MEA02, dan MEA03 menunjukkan bahwa tidak ada proses yang berhasil mencapai level 5 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BKPSDM Tuban. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki melalui analisis GAP.[15].

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan sistem secara rinci dengan kata-kata dan observasi sistem yang akan diteliti secara langsung. Dan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan referensi penelitian. Ada 3 teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

1. Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden dengan tatap muka guna mendapatkan informasi.
2. Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung aktifitas di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
3. Studi Pustaka adalah melaksanakan kajian untuk memahami penelitian terdahulu serta literatur yang berkaitan. Studi pustaka dilakukan dengan merujuk pada buku referensi, internet, jurnal, serta berbagai sumberlain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Tahapan Penelitian



Gbr. 1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan langkah awal yang diawali dengan identifikasi masalah untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui metode kualitatif yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan studi literatur guna memperoleh informasi yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis pada tahap analisis data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya, temuan penelitian dibahas dalam tahap hasil dan pembahasan, di mana data yang telah dianalisis diinterpretasikan secara lebih lanjut. Setelah itu, pada tahap kesimpulan,

dilakukan perumusan jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Akhirnya, penelitian ini diakhiri dengan tahap selesai, yang menandakan bahwa seluruh proses penelitian telah dilakukan secara sistematis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Tujuan Organisasi Dengan Enterprise Goals

Pemetaan tujuan organisasi menggunakan Enterprise Goals dalam COBIT 2019 bertujuan untuk menetapkan cakupan tujuan bisnis agar selaras dengan penerapan teknologi informasi (Alignment Goals). Hasil dari pemetaan ini dapat ditemukan dalam Tabel I

Tabel I
Pemetaan Tujuan Organisasi Dengan Enterprise Goals

Tujuan Dinas perumahan dan kawasan permukiman kota salatiga	Enterprise Goals
<p>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana</p> <p>Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah</p> <p>Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota</p> <p>Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.</p> <p>Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>1. EG12 Pengelolaan program transformasi digital</p> <p>2. EG13 Inovasi produk dan bisnis</p> <p>3. EG11 Kepatuhan terhadap kebijakan internal</p> <p>4. EG03 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal</p> <p>5. EG10 Keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas</p>

2. Pemetaan Enterprise Goals Dengan IT Related Goals Dan IT Processes

Enterprise goals didapat setelah pemetaan tujuan organisasi dengan enterprise goals yang sudah teridentifikasi, dan penyusunan IT RELATED GOALS disusun untuk membantu enterprise goals tercapai dalam bidang IT, dan IT PROSES domain yang teridentifikasi dari IT RELATED GOALS yang sudah tersusun dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel II
Pemetaan Enterprise Goals Dengan IT Related Goals Dan IT Processes

No	Enterprise Goals	IT –Related Goals	IT Proses
1	Pengelolaan program Transformasi Digital	Ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan strategis	APO03 – Manage Enterprise Architecture
2	Inovasi Produk dan Bisnis	Integrasi sistem informasi dengan instansi terkait	BAI02 – Manage Requirements Definition

3	Kepatuhan terhadap kebijakan eksternal	Kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah	MEA03 – Monitor Compliance with External Requirements
4	Kepatuhan terhadap kebijakan internal	Kepatuhan teknologi informasi dalam kebijakan internal	MEA02 – Monitor Evaluate and Assess System of Control Internal
5	Keterampilan staf, motivasi, dan produktivitas	Kompetensi SDM yang memadai	MEA01 – Monitor Performance and Conformance

3. Hasil Pengukuran Kapabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pengguna aktif Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada bidang keuangan terlihat untuk MEA01 pada hasil pengukuran kapabilitas berada pada level 3 yaitu pemantauan kinerja telah diterapkan secara standar, namun belum dilakukan analisis berbasis data secara menyeluruh. MEA02 terlihat pada hasil pengukuran kapabilitas juga berada pada level 3 yaitu prosedur kontrol internal berjalan dengan baik tetapi masih bisa ditingkatkan dengan otomatisasi. Dan MEA03 berada pada level 5 ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sudah diterapkan berjalan dengan baik dan dilakukannya inovasi ketika adanya perubahan regulasi eksternal yang berlaku. Hasil pengukuran kapabilitas dari setiap dapat dilihat pada tabel III.

Tabel III
Hasil Pengukuran Kapabilitas

Proses MEA	Deskripsi Proses	Level
MEA01	Mengelola Kinerja dan Kepatuhan Sistem TI	3
MEA02	Mengelola Sistem Kontrol Internal	3
MEA03	Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Eksternal	5

4. Analisis GAP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap domain Monitor, Evaluate, and Assess (MEA) dalam kerangka kerja COBIT 2019, terdapat tiga proses utama yang dinilai, yaitu MEA01 (Mengelola Kinerja dan Keputusan TI), MEA02 (Mengelola Sistem Kontrol Internal), dan MEA03 (Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Eksternal). Saat ini, proses MEA01 dan MEA02 terdapat adanya gap, dan belum mencapai target dari capability level yang diharapkan, sehingga terdapat kesenjangan (gap). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja dan keputusan TI serta sistem kontrol internal masih perlu ditingkatkan untuk mencapai praktik yang lebih optimal dan terintegrasi secara penuh dengan tujuan strategis organisasi. Sementara itu, MEA03 sudah mencapai target capability yang diharapkan sehingga tidak ada kesenjangan Gap yang ditemukan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi eksternal sangat baik, tetapi Upaya perbaikan di semua proses ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas sistem, memperkuat kontrol internal, serta mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola TI. Analisis Gap yang sudah tersusun dapat dilihat pada Tabel IV di bawah.

Tabel IV
Analisis GAP

Domain	Proses	Level saat ini	Level yang diharapkan	Gap
MEA01	Mengelolah Kinerja dan Keputusan TI	3	5	Belum adanya Monitoring analisi secara mendalam dan sistem peringatan dini
MEA02	Mengelolah Sistem Kontrol Internal	3	5	Belum adanya kontrol evaluasi dengan data kuantitatif dan berbasis resiko
MEA03	Memastikan Kepetuhan Terhadap Regulasi Eksternal	5	5	Tidak ada Gap

5. Temuan Dan Rekomendasi

Dari analisis Gap maka didapatlah temuan dan rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang ada pada kondisi yang saat ini dan kondisi yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel V dibawah ini.

Tabel V
Temuan Dan Rekomendasi

DOMAIN	TEMUAN	Rekomendasi
MEA 01	Belum terukur dengan berbasis data kuantitatif secara real-time, tidak ada optimasi berkelanjutan.	Monitoring analisi harus dilakukan secara mendalam. meningkatkan proses dan dikendalikan dengan target yang ketat.
MEA 02	Evaluasi kontrol masih manual, belum otomatis berbasis risiko, tidak ada monitoring berbasis data	Proses evaluasi dilakukan secara rutin dan menggunakan laporan yang berbasis data.
MEA 03	Proses berjalan sangat baik, perbaikan terus-menerus, proaktif, inovasi dilakukan	Mempertahankan konsistensi dalam mematuhi peraturan eksternal.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) sudah cukup baik dalam implementasinya namun masih memerlukan beberapa perbaikan terutama pada domain yang sudah teridentifikasi yaitu Monitor, Evaluate, and Assess 01 (MEA01), Monitor, Evaluate, and Assess 02 (MEA02), Monitor, Evaluate, and Assess 03 (MEA03). Pada Monitor, Evaluate, and Assess 01 (MEA01) terkait mengelolah kinerja dan keputusan teknologi informasi (TI) semua proses sudah terlaksana dan terdokumentasi tetapi masih butuh perbaikan dalam mengelola kinerja Teknologi Informasi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang Teknologi informasi, dan meningkatkan proses dengan dikendalikannya dengan target yang ketat. Untuk Monitor, Evaluate, and Assess 02 (MEA02) terkait mengelolah sistem kontrol internal semua proses sudah terlaksana dan terdokumentasi dengan baik dan memerlukan perbaikan terkait sistem kontrol internal yaitu tidak adanya tim khusus yang dibentuk untuk kontrol internal, proses evaluasi harus dilakukan secara rutin dan menggunakan laporan yang berbasis data. Untuk Monitor, Evaluate, and Assess 03 (MEA03) yaitu memastikan kepatuhan

terhadap regulasi eksternal pada proses ini Proses berjalan sangat baik, perbaikan terus-menerus, proaktif, inovasi dilakukan ketika adanya perubahan regulasi eksternal yang berlaku. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis dengan domain yang berbeda seperti Build, Acquire, and Implement (BAI) yang berfokus pada proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi IT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu ataupun memberikan dukungan terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti bantuan fasilitas penelitian dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. K. Rohmi, "Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara," vol. 1, pp. 155–162, 2025.
- [2] N. R. Oktadini and F. Alfito, "Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Tahanan Polda Sumsel Menggunakan Framework Cobit 2019," *J. Teknol. Informasi, Komputer, dan Apl. (JTika)*, vol. 5, no. 1, pp. 13–20, 2023, doi: 10.29303/jtika.v5i1.218.
- [3] D. R. Akhiruddin, E. S. Negara, T. Sutabri, and M. I. Herdiansyah, "Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS)," *J. Teknol. Inform. dan Komput.*, vol. 9, no. 2, pp. 834–848, 2023, doi: 10.37012/jtik.v9i2.1776.
- [4] C. N. C. Wurara, Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, and Steeva G. Rondonuwu, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon," *J. Publicuho*, vol. 7, no. 2, pp. 802–810, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i2.436.
- [5] S. N. Afifah, A. Subarno, and N. R. Akbarini, "Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo," *JIKAP (Jurnal Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran)*, vol. 7, no. 2, p. 171, Mar. 2023, doi: 10.20961/jikap.v7i2.62402.
- [6] N. Y. Aditiya, P. Dian, and I. Kusuma, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perkembangan zaman digital saat ini mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Salah satu faktor yang meningkatkan efiseinsi penginputan perencanaan," vol. 12, no. 1, 2024.
- [7] R. T. F. Palar, Y. Rindengan, and S. R. Sentinuwo, "Analisa Kematangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado Menggunakan Framework COBIT 5 Pada Domain Monitor, Evaluate and Assess," *J. Tek. Elektro dan Komput.*, pp. 1–9, 2021, [Online]. Available: <http://repo.unsrat.ac.id/3080/>
- [8] H. Ikhwani *et al.*, "PENGUNAAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Kasus Program Studi Teknik Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh)," *Cybersp. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 7, no. 2, p. 136, 2023, doi: 10.22373/cj.v7i2.18847.
- [9] E. Krisnanik *et al.*, "Analisis capability tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja cobit 2019 (studi kasus: diskoumperindag kabupaten serang, banten)," vol. 16, no. 1, pp. 47–57, 2025.
- [10] N. Lediwara, "Analisis IT Governance Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS, MEA dan BAI," *Pseudocode*, vol. 7, no. 2, pp. 97–104, 2020, doi: 10.33369/pseudocode.7.2.97-104.
- [11] Arya Dwi Utama, Andika Praja, Bima Sanjaya, and Suci Syah Putri, "Audit Sistem Informasi Dengan Framework Cobit 5 Pada E-Learning Menggunakan Domain DSS Dan MEA," *J. Komput. Teknol. Inf. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 609–615, 2024, doi: 10.62712/juktisi.v3i1.163.
- [12] N. N. Pusparini and A. Sani, "Mengukur Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akademik Dengan Model Kesuksesan Delon and Mclean," *METHOMIKA J. Manaj. Inform. dan Komputerisasi Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 149–155, 2021, doi: 10.46880/jmika.vol4no2.pp149-155.
- [13] R. J. Program, S. D.-4 Akuntansi, M. Pemerintahan, and P. N. Bandung, "Audit Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Framework COBIT 5 (Studi Kasus Pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat) Governance Audit Of Local Government Information System (SIPD) Using COBIT 5 Framework (Case Study at BAPPEDA West J)," *Indones. Account. Res. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 179–188, 2024.
- [14] A. Pratama, A. Faridhatul Ulva, and E. Pradanta Sitepu, "Audit Capability Level Sipd Menggunakan Cobit 2019 Domain Align Plan And Organize Di Bappeda Kota Lhokseumawe," *J. Tika*, vol. 7, no. 1, pp. 32–38, 2022, doi: 10.51179/tika.v7i1.1078.
- [15] D. G. Puspita, H. Mardhiana, and M. Nasrullah, "Analisis dan Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Absensi Online Menggunakan Framework COBIT 5 . 0 (Studi Kasus : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban)," vol. 0, pp. 1–11, 2023